

STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

NILUH OKTA PREMA DEWI
NPP 32.0862

Asdaf Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Administrasi Pemerintah Daerah

Email: oktapremadewi@gmail.com

Pembimbing Skripsi : H. Ismunarta S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The poverty rate in Parigi Moutong Regency is still quite high. The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance program that aims to reduce poverty through education, health and social welfare interventions. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze strategies as well as internal and external factors in optimizing PKH through SWOT analysis in overcoming poverty in Parigi Moutong Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach method with an inductive approach and uses SWOT analysis. Data collection techniques are carried out through interviews, observations and documentation. The data analysis is carried out by means of data reduction, data presentation and conclusion drawing using the SWOT analysis framework from Freddy Rangkuti and to determine the most strategic issues using the Litmus Test. **Results:** The results of this study show that there are strategies obtained from SWOT analysis that can be applied by the Social Service in optimizing the implementation of PKH. Internal factors that influence the implementation of PKH consist of strengths (local government commitment, clear PKH regulations and mechanisms and access to social services) and weaknesses (limited number of PKH assistants, inaccurate KPM data and high economic dependence on PKH assistance) as well as external factors which include opportunities (technological advances and increased public awareness and participation) and threats (low levels of education and limited infrastructure). The obstacles in the implementation of PKH are the incompatibility of KPM data, slow verification and validation of data, remote and difficult to reach geographical factors, and the lack of KPM presence in P2K2. Efforts made by the Social Service to overcome obstacles are in the form of providing PKH support facilities, cross-agency coordination for data accuracy, and improving communication related to the P2K2 schedule. **Conclusion:** By implementing the strategies resulting from this study, it is hoped that it

can contribute to improving the implementation of PKH and reducing poverty rates in Parigi Moutong Regency.

Keywords: *Family Hope Program (PKH), SWOT Analysis, Poverty*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Tingkat kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong masih cukup tinggi. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui intervensi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi serta faktor internal dan faktor eksternal dalam mengoptimalkan PKH melalui analisis SWOT dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menggunakan analisis SWOT. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang menggunakan kerangka analisis SWOT dari Freddy Rangkuti serta untuk menentukan isu paling strategi menggunakan Tes Litmus. **Hasil/ Temuan :** Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya strategi yang diperoleh dari analisis SWOT yang bisa diterapkan oleh Dinas Sosial dalam mengoptimalkan pelaksanaan PKH. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan PKH terdiri dari kekuatan (komitmen pemerintah lokal, regulasi dan mekanisme PKH yang jelas serta akses terhadap layanan sosial) dan kelemahan (terbatasnya jumlah tenaga pendamping PKH, data KPM yang kurang akurat dan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap bantuan PKH) serta faktor eksternal yang meliputi peluang (kemajuan teknologi serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat) dan ancaman (rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan infrastruktur). Adapun kendala dalam pelaksanaan PKH berupa tidak padannya data KPM, lambatnya verifikasi dan validasi data, faktor geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, serta kehadiran KPM yang kurang dalam P2K2. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial untuk mengatasi kendala berupa penyediaan sarana pendukung PKH, koordinasi lintas dinas untuk akurasi data, serta peningkatan komunikasi terkait jadwal P2K2. **Kesimpulan :** Dengan menerapkan strategi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan implementasi PKH dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Analisis SWOT, Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial serius dan telah menjadi permasalahan global yang dihadapi oleh seluruh negara di belahan dunia, khususnya bagi negara-negara berkembang. Permasalahan kemiskinan bersumber dari berbagai macam sektor seperti kesehatan, pendidikan,

pembangunan, tenaga kerja dan dikatakan sebagai permasalahan multidimensi, karena menyangkut berbagai persoalan kebutuhan hidup (Heryanti, 2019). Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak lepas dari masalah kemiskinan yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat secara luas karena berkaitan erat dengan berbagai dimensi kehidupan masyarakat (Adawiyah, 2020). Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuan pembangunan untuk periode 2023-2025 yang memiliki fokus utama yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan, menurunkan kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret tahun 2023, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan jumlah dan persentase penduduk miskin tertinggi kedua diantara provinsi lain di Pulau Sulawesi. Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar 12,41% dengan peningkatan sebesar 0,11% poin jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada September tahun 2022 yang sebesar 12,33%. Pada tahun 2023 secara absolut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 395,66 ribu jiwa adalah tertinggi kedua di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 788,85 ribu jiwa. Berikut merupakan jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021-2023.

Tabel 1.1
Jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah (Ribuk) Tahun 2021-2024

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota (Ribuk) | | | |
|-----|-------------------|---|--------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Banggai Kepulauan | 16,33 | 16,07 | 15,50 | 14,86 |
| 2. | Banggai | 30,10 | 28,55 | 27,38 | 26,21 |
| 3. | Morowali | 17,07 | 15,86 | 15,75 | 14,99 |
| 4. | Poso | 41,99 | 40,78 | 41,48 | 39,63 |
| 5. | Donggala | 51,23 | 50,22 | 50,37 | 47,68 |
| 6. | Toli-Toli | 32,19 | 30,61 | 31,13 | 30,39 |
| 7. | Buol | 23,46 | 21,84 | 23,13 | 23,05 |
| 8. | Parigi Moutong | 76,79 | 74,60 | 77,18 | 74,57 |
| 9. | Tojo Una-Una | 25,86 | 25,33 | 26,51 | 26,12 |
| 10. | Sigi | 31,51 | 29,94 | 31,47 | 29,80 |
| 11. | Banggai Laut | 10,92 | 10,32 | 11,27 | 11,16 |
| 12. | Morowali Utara | 18,40 | 17,49 | 17,66 | 16,74 |
| 13. | Kota Palu | 28,60 | 26,75 | 26,83 | 24,53 |
| | Sulawesi Tengah | 404,44 | 388,36 | 395,66 | 379,76 |

Sumber : Badan Pusat statistik, 2024

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sebanyak 379,76 ribu jiwa dan pada Tahun 2023 sebanyak 395,66 ribu jiwa dengan peningkatan sebanyak 7,3 ribu jiwa apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2022 sejumlah 388,36 ribu jiwa. Pada tahun 2021-2023, Kabupaten Parigi Moutong menjadi kabupaten yang menempati peringkat pertama yang memiliki total penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah. Total penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2023, yaitu sebanyak 77,18 ribu jiwa dengan garis kemiskinan 531.255 rupiah/kapita/bulan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong mengalami kenaikan sebanyak 2,58 ribu jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 yang sejumlah 74,60 ribu jiwa.

Menurut data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2023 sebesar 14,91% yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,28% persen bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tahun 2022. Jumlah persentase penduduk miskin yang dimiliki oleh Kabupaten Parigi Moutong bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan dari Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri yang hanya sebesar 12,41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Parigi Moutong masih memiliki jumlah penduduk miskin atau tingkat kemiskinan yang tinggi.

Faktor penyebab kemiskinan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong yaitu terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2023 adalah 12,51 tahun yang menunjukkan bahwa anak umur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk menempuh pendidikan sampai dengan lulus Sekolah Menengah Atas. Sementara apabila ditinjau dari rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 adalah sebesar 8.04 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah wajar pendidikan dengan waktu 9 tahun belum bisa dituntaskan. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tersebut menunjukkan bahwa tingkat dan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Parigi Moutong masih cukup rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Parigi Moutong.

Sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan yang berfokus pada rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang disebut sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dijalankan sejak tahun 2007. PKH adalah program bantuan tunai bersyarat nasional di Indonesia (Irene Sondang Fitrinitia et al, 2022). PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan memberikan Bantuan Tunai Bersyarat setiap triwulan (Agus Heruanto Hadna et al, 2017). Tujuan khusus dari program PKH adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin (Aslinda et al., 2022).

Peraturan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan PKH adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Sasaran PKH adalah rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan dan merupakan satu-satunya program nasional yang menyediakan transfer bersyarat tunai untuk rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia

(Irene Sondang Fitritinia et al, 2023). Menurut (Erfain et al, 2021), Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai jika memenuhi syarat di bidang pendidikan dan kesehatan. PKH tidak hanya membantu mengatasi masalah keuangan, tetapi juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup generasi penerus berikutnya (Pratama et al, 2021). Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019-2023, permasalahan yang dihadapi dalam penanganan masalah kemiskinan melalui program keluarga harapan adalah jumlah peserta PKH yang terus meningkat dan jumlah pendamping PKH yang terbatas.

Jumlah keluarga penerima manfaat PKH yang ada di kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 sebanyak 20.122 keluarga yang mengalami kenaikan sebanyak 109 keluarga jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 20.013 keluarga. Jumlah KPM PKH tersebut masih tergolong tinggi jika di bandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih tinggi menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong terhadap bantuan sosial dari program keluarga harapan juga masih tinggi. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri merupakan faktor yang menjadi penyebab masalah kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong. Jumlah penerima manfaat PKH yang mengalami penurunan tiap tahunnya sementara persentase penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong mengalami kenaikan sehingga masih menempatkan Parigi Moutong sebagai Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh dinas sosial dalam pelaksanaan PKH untuk menjangkau masyarakat miskin secara akurat. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu adanya strategi baru yang dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Parigi Moutong.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Parigi Moutong, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis pembangunan yang memperoleh fokus dan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong khususnya Dinas Sosial telah menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan sosial bersyarat yang diserahkan kepada rumah tangga dengan kategori miskin yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Akan tetapi, Kabupaten Parigi Moutong masih menjadi kabupaten yang menghadapi tingginya angka kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah pengangguran yang meningkat.

Pelaksanaan PKH sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan optimal dikarenakan belum adanya strategi dari dinas sosial yang secara khusus ditujukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan PKH dan masih terdapat

permasalahan dalam pelaksanaan PKH meliputi tingginya jumlah keluarga penerima manfaat PKH dan terbatasnya jumlah tenaga pendamping PKH, data keluarga penerima manfaat yang kurang akurat, serta masyarakat di wilayah terpencil yang tidak terdaftar dalam basis data terpadu karena tidak memiliki NIK.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Rakhma Roudlotul Khusna pada (2020) yang berjudul *Strategi Komunikasi Dinas Sosial Ngawi Dalam Mengatasi Masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Ngawi Melalui Program Keluarga Harapan* menunjukkan bahwa strategi komunikasi dinas sosial Kabupaten Ngawi dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menerapkan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dan graduasi mandiri sudah cukup berhasil dilihat dari penyaluran PKH yang tepat sasaran dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi yang menurun (Rakhma Roudlotul Khusna, 2020). Penelitian yang dilakukan mempunyai kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terkait penggunaan metode kualitatif, sementara perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu fokus pada masalah kesejahteraan masyarakat miskin dan penelitian peneliti fokus pada penanggulangan kemiskinan, selain itu perbedaan juga terletak pada teori yang digunakan dalam menganalisis masalah dan lokus penelitian yang berbeda.

Penelitian kedua oleh Allysa Aprilia Sunardi pada (2022) yang berjudul *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat* menemukan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ciparay secara umum sudah berjalan baik namun belum optimal (Allysa Aprilia Sunardi, 2022). Melihat masih adanya indikator yang belum tercapai maksimal, yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan serta kurangnya komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Penelitian yang dilakukan mempunyai kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terkait penggunaan metode kualitatif, sementara perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dalam menganalisis masalah dan lokus penelitian yang berbeda.

Penelitian ketiga oleh Suyanti pada (2021) yang berjudul *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (studi kasus di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)* menunjukkan bahwa PKH yang dijalankan di Desa Basuki telah berjalan secara efektif ditinjau dari ketercapaian indikator efektivitas program, tetapi ditinjau dari nilai ekonomi islam yaitu keadilan dimana masih banyak penduduk miskin yang tidak masuk dalam DTKS dan waktu pencairan bantuan yang masih mengalami keterlambatan (Suyanti,2021). Penelitian yang dilakukan mempunyai kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terkait penggunaan metode kualitatif, sementara perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dan lokus penelitian yang berbeda. Perbedaan lainnya adalah penelitian sebelumnya juga menganalisis efektivitas PKH dari sudut pandang ekonomi islam, sementara penelitian peneliti menjelaskan strategi penanggulangan kemiskinan melalui PKH.

Penelitian keempat oleh Andri Juan pada (2023) yang berjudul *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Battang Kota Palopo*

yang menunjukkan bahwa penerapan PKH di Kelurahan Battang telah berjalan dengan baik tetapi jumlah penerima PKH mengalami fluktuasi yang cenderung naik karena adanya peningkatan alokasi anggaran untuk PKH, sementara faktor yang menghambat implementasi PKH adalah pemahaman masyarakat yang kurang terkait penerimaan PKH (Andri Juan, 2023). Penelitian yang dilakukan mempunyai kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terkait penggunaan metode kualitatif, sementara perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dalam menganalisis masalah kemiskinan dan lokus penelitian yang berbeda.

Peneliti kelima oleh Musakkar pada (2021) yang berjudul *Strategi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone* menunjukkan bahwa strategi PKH dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kecamatan Kahu telah berjalan baik jika ditinjau dari indikator teori strategi, adapun faktor yang menghambat pelaksanaan PKH yaitu terkait pendataan dan kurangnya komunikasi antara pelaksana dan penerima PKH (Musakkar, 2021). Penelitian yang dilakukan mempunyai kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terkait penggunaan metode kualitatif, sementara perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian sebelumnya fokus pada strategi PKH dalam peningkatan kualitas pendidikan sementara penelitian peneliti fokus pada strategi penanggulangan kemiskinan melalui PKH. Perbedaan lainnya terletak pada teori yang digunakan dalam menganalisis masalah dimana penelitian sebelumnya menggunakan teori strategi oleh Suwarjono sementara penelitian peneliti menggunakan teori strategi analisis SWOT oleh Rangkuti. Selain itu, lokus penelitian juga berbeda.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (novelty) dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu terkait dengan strategi dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya membahas terkait efektivitas dan potret implementasi PKH secara umum, penelitian ini menggunakan teori strategi analisis SWOT oleh Freddy Rangkuti (2021) dan penelitian ini menawarkan formulasi strategi berbasis potensi lokal yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan PKH. Selain itu, penelitian ini menggunakan indikator/pengukuran yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu menggunakan penggabungan dari analisis SWOT dan tes litmus untuk mengidentifikasi strategi atau isu-isu yang dapat diterapkan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dinas sosial Kabupaten Parigi Moutong dalam penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan menjadi optimal di Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dihadapi dinas sosial dalam dalam penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan. Selanjutnya, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas sosial dalam

mengatasi kendala terkait penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan di Kabupaten Parigi Moutong.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menggunakan analisis SWOT. Metode penelitian ini digunakan karena penelitian kualitatif sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitiannya bersifat fleksibel atau memiliki kemungkinan untuk dapat diubah dengan tujuan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat, dengan fenomena yang ditemukan pada lokasi penelitian yang sebenarnya (Simangunsong, 2017). Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai status fenomena variabel dan kondisi tertentu (Ismail Nurdin et al, 2019). Dalam penelitian kualitatif, yang berperan menjadi instrumen atau alat penelitian ialah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2012). Penelitian dilaksanakan selama 21 hari di Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan sebagai sampel berdasarkan kebutuhan terkait informasi yang berkaitan dengan fokus permasalahan yaitu penanggulangan kemiskinan melalui PKH. Informan penelitian ini meliputi sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial, penyuluh sosial ahli muda, coordinator PKH Kabupaten Parigi Moutong, pendamping PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kabupaten Parigi Moutong. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang menggunakan kerangka analisis SWOT dari Freddy Rangkuti serta untuk menentukan isu paling strategi menggunakan Tes Litmus. Analisis SWOT memiliki fokus untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang sambil meminimalkan kelemahan dan ancaman yang diperoleh dari pengambilan keputusan strategis. Isu strategis yang telah teridentifikasi dengan menggunakan analisis SWOT kemudian diberikan penilaian menurut hasil perhitungan atas setiap pertanyaan dalam uji litmus. Penelitian di lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Strategi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui PKH di Kabupaten Parigi Moutong

3.1.1 Faktor Strategis Internal Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui PKH Kabupaten Parigi Moutong

Faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Kekuatan (*Strength*) merupakan suatu keadaan atau kondisi yang memberikan keuntungan karena dapat menjadi sumber kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan melalui PKH yaitu :

a. Komitmen Pemerintah Lokal

Strategi penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam RPD dan tindakan konkret berupa pelaksanaan program penyediaan air minum berbasis masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial menunjukkan kesungguhan dan komitmen

pemerintah lokal dalam beberapa tahun yang akan datang dengan tujuan atau sasaran untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.

b. Regulasi dan Mekanisme yang Jelas

Regulasi yang mengatur pelaksana teknis dari PKH adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang mengatur terkait mekanisme pendaftaran, verifikasi data, penyaluran bantuan PKH, dan pendampingan KPM. PKH memiliki mekanisme yang jelas dan terstruktur mulai dari pendataan, verifikasi data, penyaluran bantuan, P2K2, hingga proses pengawasan dan evaluasi.

c. Akses ke Layanan Sosial

Pelaksanaan akses layanan sosial untuk KPM di Kabupaten Parigi Moutong sudah berjalan cukup baik. Melalui PKH, keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, didorong untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Setiap KPM memperoleh akses yang sama terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sesuai kategori yang telah ditentukan.

Sementara kelemahan (*weakness*) mengacu pada faktor-faktor internal dalam suatu organisasi yang menghambat pencapaian tujuan. Kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan melalui PKH yaitu:

a. Terbatasnya Jumlah Tenaga Pendamping PKH

Jumlah tenaga pendamping PKH yang ada di Kabupaten Parigi Moutong masih terbatas. Tidak semua desa di Kabupaten Parigi Moutong memiliki tenaga pendamping PKH yang memadai. Persebaran tenaga pendamping tidak merata di semua kecamatan dan desa serta beban kerja besar yang dimiliki oleh tenaga pendamping karena harus mendampingi KPM yang jauh lebih banyak dari kapasitas yang seharusnya. Keterbatasan tenaga pendamping menyebabkan berkurangnya kualitas pendampingan, sehingga aspek edukasi dan pemberdayaan ekonomi penerima manfaat menjadi tidak maksimal.

b. Data KPM yang Kurang Akurat

Data KPM masih kurang akurat dimana masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Data KPM yang kurang akurat di Kabupaten Parigi Moutong disebabkan oleh banyak hal seperti faktor-faktor teknis meliputi dinamika perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang cepat dengan tidak disertai pembaruan data yang memadai sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara data sistem dan realitas di lapangan. Selain itu faktor geografis dan faktor sosial budaya khususnya pada masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) menyebabkan data KPM kurang akurat.

c. Ketergantungan Ekonomi yang Tinggi Terhadap Bantuan PKH

PKH belum sepenuhnya berhasil mendorong kemandirian ekonomi di kalangan masyarakat miskin, sehingga banyak KPM yang belum memiliki motivasi untuk mencari

sumber pendapatan alternatif atau mengembangkan usaha sendiri. Banyak penerima manfaat PKH tidak memiliki pekerjaan dan hanya bergantung terhadap bantuan PKH dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi KPM terhadap bantuan PKH sangat tinggi.

3.1.2 Faktor Strategis Eksternal Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui PKH di Kabupaten Parigi Moutong

Faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Peluang (*opportunities*) merupakan faktor eksternal yang dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi suatu organisasi jika dimanfaatkan dengan baik. Berikut merupakan peluang dalam penanggulangan kemiskinan melalui PKH di Kabupaten Parigi Moutong :

a. Kemajuan Teknologi

Pemanfaatan kemajuan teknologi dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang telah terhubung dengan jaringan internet seperti aplikasi SIKS-NG dan aplikasi Cek Bansos. Melalui aplikasi SIKS-NG dan aplikasi Cek Bansos maka proses pengumpulan dan pengelolaan data penerima manfaat bisa dilakukan secara lebih akurat dan terpadu, sehingga risiko kesalahan dalam penyaluran bantuan bisa dikurangi.

b. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Secara keseluruhan masyarakat mulai aktif untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan PKH dengan melaporkan ketidaktepatan data penerima manfaat melalui pengaduan dengan menggunakan fitur sanggahan yang terdapat dalam aplikasi cek bansos. Selain itu juga masyarakat turut aktif dalam menyampaikan opini dan kritiknya terkait kendala dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan khususnya PKH.

Sementara ancaman (*threats*) adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar organisasi yang dapat menghambat atau mengurangi efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Berikut merupakan ancaman dalam penanggulangan kemiskinan melalui PKH di Kabupaten Parigi Moutong :

a. Tingkat Pendidikan

Banyak anak usia sekolah di Kabupaten Parigi Moutong yang hanya sekolah sampai tingkat SMP dan tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rendahnya pemahaman terkait pentingnya pendidikan dan keterbatasan ekonomi menyebabkan anak usia sekolah lebih memilih untuk putus sekolah dan bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikannya.

b. Keterbatasan Infrastruktur

Jalanan di Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun 2023 memiliki total panjang 1.603,89 kilometer. Dari jumlah tersebut, panjang jalan dengan kondisi baik 364,98 kilometer, panjang jalan dalam kondisi sedang 134,20 kilometer, panjang jalan yang mengalami

kerusakan 27,97 kilometer dan panjang jalan yang mengalami kerusakan berat 961,75 kilometer. Hal tersebut menunjukkan bahwa jalan yang mengalami kerusakan lebih banyak daripada jalan yang dalam kondisi baik.

3.1.3 Analisis SWOT Terhadap Indikator yang Diperoleh Dari Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Berikut ini merupakan hasil analisis SWOT yang merupakan kombinasi dari faktor internal dan faktor eksternal menurut teori Rangkuti :

1. Kombinasi dari indikator kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*) atau **SO** menghasilkan :
 - a. Memanfaatkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen pemerintah lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui PKH. (Formulasi : S1-O2)
 - b. Menggunakan kemajuan teknologi sebagai media untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait regulasi dan mekanisme pelaksanaan PKH. (Formulasi : S2-O1)
 - c. Memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai kesempatan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan sosial untuk meningkatkan kualitas SDM. (Formulasi : S3-O1)
2. Kombinasi dari indikator kekuatan (*strength*) dan ancaman (*threats*) atau **ST** menghasilkan:
 - a. Memanfaatkan komitmen pemerintah lokal untuk memperbaiki tantangan infrastruktur. (Formulasi : S1-T2)
 - b. Memanfaatkan regulasi dan mekanisme pelaksanaan PKH yang jelas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. (Formulasi : S2-T1)
 - c. Mengoptimalkan akses keluarga penerima manfaat ke layanan sosial untuk meningkatkan tingkat pendidikan. (Formulasi : S3-T1)
3. Kombinasi dari indikator kelemahan (*weakness*) dan peluang (*opportunities*) atau **WO** menghasilkan :
 - a. Meningkatkan kompetensi dan jumlah tenaga pendamping PKH melalui penyelenggaraan pelatihan daring dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. (Formulasi : W1-O1)
 - b. Pemanfaatan kemajuan teknologi sebagai media untuk meningkatkan pendataan KPM secara akurat. (Formulasi : W2-O1)
 - c. Memanfaatkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai upaya mendorong kemandirian masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan keterampilan diri untuk mengurangi tingkat ketergantungan ekonomi terhadap bantuan PKH. (Formulasi : W3-O2)
4. Kombinasi dari indikator kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) atau **WT** menghasilkan :

- a. Meningkatkan kualitas pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh tenaga pendamping PKH untuk meningkatkan tingkat pendidikan. (Formulasi : W1-T1)
- b. Optimalisasi keterlibatan masyarakat lokal dan perangkat desa untuk peningkatan akurasi pendataan KPM di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan daerah terpencil. (Formulasi : W2-T2)
- c. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat untuk mengurangi tingkat ketergantungan ekonomi terhadap bantuan PKH. (Formulasi : W3-T1).

3.1.4 Hasil Analisis tes Litmus (Menguji Isu Strategis)

Setelah dilakukan uji litmus, maka dapat diketahui tingkat kestrategisan dari masing-masing isu strategis dari isu 1 sampai isu 12 adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan kemajuan teknologi sebagai media untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait regulasi dan mekanisme pelaksanaan PKH, dimana isu ini termasuk dalam kriteria isu sangat strategis dengan skor 36.
2. Memanfaatkan komitmen pemerintah lokal untuk memperbaiki tantangan infrastruktur, dimana isu ini termasuk dalam kriteria isu sangat strategis dengan skor 36.
3. Mengoptimalkan akses keluarga penerima manfaat ke layanan sosial untuk meningkatkan tingkat pendidikan, dimana isu ini termasuk dalam kriteria isu sangat strategis dengan skor 35.
4. Pemanfaatan kemajuan teknologi sebagai media untuk meningkatkan pendataan KPM secara akurat, dimana isu ini termasuk dalam kriteria isu sangat strategis dengan skor 35.
5. Memanfaatkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai upaya mendorong kemandirian masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan keterampilan diri untuk mengurangi tingkat ketergantungan ekonomi terhadap bantuan PKH, dimana isu ini termasuk dalam kriteria isu sangat strategis dengan skor 35.
6. Memanfaatkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen pemerintah lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui PKH, dimana isu ini termasuk dalam kriteria isu strategis dengan skor 33.
7. Memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai kesempatan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan sosial untuk meningkatkan kualitas SDM, dimana isu ini termasuk dalam kriteria isu sangat strategis dengan skor 33.
8. Meningkatkan kompetensi dan jumlah tenaga pendamping PKH melalui penyelenggaraan pelatihan daring dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dimana isu ini termasuk dalam kriteria isu sangat strategis dengan skor 33.
9. Meningkatkan kualitas pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh tenaga pendamping PKH untuk meningkatkan tingkat pendidikan, dimana isu ini termasuk dalam kriteria isu sangat strategis dengan skor 33.
10. Optimalisasi keterlibatan masyarakat lokal dan perangkat desa untuk peningkatan akurasi pendataan KPM di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan daerah terpencil, dimana isu ini termasuk dalam kriteria isu sangat strategis dengan skor 34.

11. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat untuk mengurangi tingkat ketergantungan ekonomi terhadap bantuan PKH, dimana isu ini termasuk dalam kriteria isu sangat strategis dengan skor 33.
12. Memanfaatkan regulasi dan mekanisme pelaksanaan PKH yang jelas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, dimana isu ini termasuk dalam kriteria isu cukup strategis dengan skor 30.

Kriteria strategis yang diperoleh dari uji litmus pada isu-isu yang ada, menunjukkan bahwa 11 dari 12 isu termasuk dalam kriteria isu sangat strategis dan 1 isu masuk dalam kriteria isu cukup strategis.

3.2 Kendala Dalam penanggulangan Kemiskinan Melalui PKH di Kabupaten Parigi Moutong

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong masih mengalami beberapa kendala yang menghambat efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya terkait ketidaksesuaian atau ketidakpadanan data penerima PKH yang sering kali menyebabkan keluarga miskin kehilangan hak sebagai penerima manfaat PKH. Dalam sistem pendataan PKH, keberadaan anggota keluarga yang telah bekerja dengan gaji tetap dapat mempengaruhi status kelayakan penerima manfaat. Akibatnya, saat proses pemadanan data dilakukan, orang tua atau anggota keluarga yang seharusnya masih berhak menerima bantuan justru dikeluarkan dari daftar penerima karena dianggap sudah tidak memenuhi kriteria.

Selain itu, lambatnya proses verifikasi dan validasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan PKH. Operator yang bertanggung jawab dalam mengolah data terkadang mengalami keterlambatan dalam proses verifikasi, yang berdampak pada tidak sinkronnya data antara penerima manfaat di lapangan dengan data yang tercatat dalam sistem. Masalah lainnya terkait kendala letak geografis sulit di jangkau dan keterbatasan infrastruktur merupakan tantangan yang menghambat pelaksanaan program keluarga harapan dalam menjangkau masyarakat miskin yang tinggal di daerah pelosok. Kendala terakhir yang dihadapi juga terkait dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat penerima manfaat dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setelah menerima bantuan program keluarga harapan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kurangnya pemahaman di kalangan penerima manfaat mengenai pentingnya P2K2 sebagai bagian dari program PKH yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kapasitas KPM dalam mengelola bantuan yang diterima sehingga dapat membantu KPM keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.

3.2 Upaya Dinas Sosial Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Kemiskinan Melalui PKH di Kabupaten Parigi Moutong

Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada dalam penanggulangan kemiskinan melalui PKH, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya

adalah dengan melakukan kerja sama lintas dinas untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat PKH secara berkala. Selain itu dari segi penganggaran juga terdapat upaya aktif dengan melakukan pengusulan pembagian anggaran dengan DPRD Kabupaten Parigi Moutong agar dana aspirasi masyarakat yang dimiliki oleh anggota DPRD bisa diarahkan bantuannya untuk diberikan ke daerah-daerah terpencil sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat miskin di daerah tersebut.

Upaya lainnya yang dilakukan adalah penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan PKH mulai dari laptop, komputer hingga kendaraan. Laptop yang ada diberikan kepada masing-masing koordinator PKH Kecamatan. Akan tetapi, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PKH yang ada sudah tua dan mulai rusak. Sarana pendukung seperti kendaraan bermotor dan laptop hanya beberapa saja yang masih layak digunakan untuk menunjang pelaksanaan PKH.

Selain itu, dilakukan juga peningkatan komunikasi dan pemberian informasi terkait jadwal Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2) melalui pengumuman secara langsung ataupun melalui media sosial serta dengan melakukan pendekatan secara personal dengan setiap keluarga penerima manfaat untuk mengetahui permasalahan yang dialami sehingga menciptakan hubungan yang lebih dekat antara tenaga pendamping PKH dan penerima manfaat.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Musakkar (Musakkar, 2021) yang menemukan bahwa strategi PKH dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kecamatan Kahu telah berjalan baik jika ditinjau dari indikator teori strategi oleh Suwarjono sementara penelitian ini menitikberatkan penentuan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan PKH dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan analisis SWOT yang berdasarkan 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang diperoleh langsung di lapangan ataupun melalui data-data yang ada. Penelitian ini menggunakan matriks SWOT untuk menghasilkan strategi dari gabungan faktor faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan PKH di Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan analisis SWOT diketahui bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Parigi Moutong dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi kekuatan (komitmen pemerintah lokal, regulasi dan mekanisme PKH yang jelas serta akses terhadap layanan sosial) dan kelemahan (terbatasnya jumlah tenaga pendamping PKH, data KPM yang kurang akurat dan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap bantuan PKH) serta faktor eksternal yang meliputi peluang (kemajuan teknologi serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat) dan ancaman (rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan infrastruktur). Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, diketahui bahwa keberhasilan implementasi program PKH sangat dipengaruhi oleh kapasitas internal Dinas Sosial serta kemampuan dalam merespon tantangan dan memanfaatkan peluang eksternal secara adaptif dan inovatif.

Hasil analisis SWOT mengidentifikasi sejumlah strategi yang memiliki tingkat kestrategisan tinggi berdasarkan uji litmus. Analisis SWOT melalui matriks SWOT menghasilkan 12 isu strategis dimana melalui uji litmus diperoleh bahwa 11 isu strategis merupakan isu yang tergolong

ke dalam kategori isu sangat strategis dan 1 isu tergolong ke dalam kategori isu cukup strategis, Adapun isu yang memperoleh kategori sangat strategis dengan skor tertinggi meliputi isu menggunakan kemajuan teknologi sebagai media untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait regulasi dan mekanisme pelaksanaan PKH dan isu memanfaatkan komitmen pemerintah lokal untuk memperbaiki tantangan infrastruktur, dimana kedua isu ini termasuk dalam kriteria isu sangat strategis dengan skor 36. Sementara isu yang memperoleh kategori cukup strategis dengan skor terendah meliputi isu memanfaatkan regulasi dan mekanisme pelaksanaan PKH yang jelas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, dimana isu ini termasuk dalam kriteria isu cukup strategis dengan skor 30.

Isu-isu seperti pemanfaatan teknologi untuk menyebarluaskan informasi, memperkuat komitmen lokal terhadap tantangan infrastruktur, serta penguatan pendampingan melalui pelatihan daring mendapat skor strategis tinggi, menandakan bahwa langkah-langkah tersebut layak dijadikan prioritas dalam perumusan kebijakan dan program lanjutan. Salah satu temuan penting dari analisis SWOT adalah bahwa sinergi antara kekuatan internal dan peluang eksternal menjadi pendekatan paling strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan PKH dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka berikut merupakan kesimpulan utama yang diperoleh:

1. Kabupaten Parigi Moutong memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga memerlukan intervensi strategis melalui PKH. Pelaksanaan PKH dalam menanggulangi kemiskinan belum optimal sehingga memerlukan strategi yang tepat melalui analisis SWOT terhadap faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa strategi yang diperoleh kemudian di uji melalui tes litmus untuk menilai isu-isu strategis yang dapat diterapkan oleh Dinas Sosial yang memperoleh hasil 11 dari 12 isu termasuk dalam kriteria isu sangat strategis dan 1 isu masuk dalam kriteria isu cukup strategis.
2. PKH berpotensi mengurangi kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, namun implementasinya masih menghadapi kendala meliputi tidak padannya data KPM, lambatnya verifikasi dan validasi data oleh operator desa, faktor geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, keterlambatan penerbitan kartu ATM dan buku tabungan serta kehadiran KPM yang kurang dalam P2K2.
3. Dinas Sosial telah melakukan upaya dalam mengatasi kendala yaitu kerja sama antar instansi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung PKH hingga penggalangan dukungan anggaran kepada DPRD serta peningkatan komunikasi dan informasi terkait jadwal pertemuan bulanan oleh pendamping PKH. Upaya yang dilakukan belum optimal dimana sarana dan prasarana pendukung PKH sudah tua dan rusak serta tingkat kehadiran KPM dalam P2K2 yang masih tidak konsisten, sehingga perlu penguatan dalam aspek monitoring, evaluasi dan sinergi lintas sektor.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini, khususnya kepada keluarga, dosen pembimbing, dan instansi terkait. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, S. E. 2020 . Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Jurnal Of Social Work and Social Service*, Volume 1(April). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/download/6336/4107>
- Aslinda., Guntur, Muhammad & Suhartini. (2022). *The implementation of multi-organization model on Program Keluarga Harapan in Makassar city*. 043. *Journal : Social Sciences*. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2022.43.1.19>
- Erfain, Harianto, dkk. 2021. Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i3.40> . ISSN : 2808-1307
- Hadna, Agus Heruanto & Kartika, Dyah. (2017). *Evaluation of poverty alleviation policy: Canconditional cash transfers improve the academicperformance of poor students in Indonesia?*,3. *Journal: Politics and international relations* <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1295548>
- Heryanti, H. 2019. Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.501>
- Fitritinia, Irene Sondang & Matsuyuki, Mihoko. (2022). *Role of social protection in coping strategies for floods in poor households: A case study on the impact of Program Keluarga Harapan on labor households in Indonesia*. 80. *International journal : Disaster risk reduction*. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.103239>
- Fitritinia, Irene Sondang & Matsuyuki, Mihoko. (2023). *Social protection for climate-disasters: A case study of the program Keluarga Harapan cash transfer program for smallholder farm household in Indonesia* . 17. *International journal : Disaster risk reduction*. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2023.100278>
- Juan, Andi (2023). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Battang Kota Palopo*. Skripsi. Palopo : Institut Agama Islam Negeri Palopo

- Khusna, Rakhma Roudlotul (2020). *Strategi Komunikasi Dinas Sosial Ngawi Dalam Mengatasi Masalah kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi Melalui Program keluarga Harapan. Skripsi*. Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Musakkar (2019). *Strategi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Skripsi*. Makassar : Universitas Muhammadiyah
- Nurdin, Ismail & Hartati, Sri. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Media Sahabat Cendekia
- Pratama, P. D. W., dkk. 2021. Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *Jurnal : Ilmu Sosial Politik*, 13(2).
<https://doi.org/10.37637/locus.v13i2.769>
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012 . *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sunardi, Allysa Aprilia (2022). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Skripsi*. Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Suyanti (2021). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (studi kasus di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)*. *Skripsi*. Purwokerto : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri